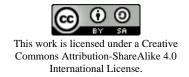
Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 5, No. 2, Dec 2020, 9-16 p-ISSN 2541-7150 | e-ISSN 2776-7019



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

Dudi Irfani

Vissia Consulting, Indonesia E-mail: dudiirfani7@gmail.com

ABSTRACT

The objectives formulated in this study are: 1). To analyze whether PAD and DAU have an effect on economic growth. 2). To analyze how much influence PAD and DAU have on economic growth. The research method in this study is a data analysis technique used in this study is quantitative analysis. With the Classical Assumption test, namely: Normality, Multicholinearity, heteroskedasticity, Autocorrelation. Multiple Regression Test, Hypothesis Test includes T Test and F Test, Correlation coefficient Test, Determination coefficient test. The results showed that independent variables, namely local original income and general allocation funds, had a significant effect on economic growth with a test value of F 3.947 and a signification rate of 0.031, then H0 was rejected which means that there is a significant influence of variable X on variable Y. while the degree of influence of variable X on variable Y can be seen from R square by 20% while the remaining 80% is influenced by other variables that are not included in this study.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, and Economic Growth.

Pendahuluan

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapakan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah "Money Follows Functions", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berupa PAD, dan dana perimbangan berupa DAU serta dana otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.(Putri, 2015).

Rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah dan cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan belanja modal daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pelayanan publik, pemerintah daerah setempat melakukan pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditunjukkan untuk peningkatan potensi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik yang tercermin dari adanya peningkatan PAD terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Dalam mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperlukan indikator yang *representative*. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah provinsi/Kabupatern/Kota. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Dengan demikian pemakaian indicator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam kurun waktu sepuluh tahun, duapuluh tahun, lima puluh tahun atau bahkan lebih (Nur'aini et. al, 2013).

Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 157,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 110,18 triliun. Ekonomi Banten tahun 2017 tumbuh 5,89 persen (y-on-y). pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi penerimaan provinsi banten pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,71 triliun rupiah atau memberi koontribusi sekitar 59,16 persen dari total penerimaan. Adapun dana alokasi umum provinsi banten pada tahun 2017 yaitu 1,06 triliun rupiah (BPS Banten, 2018).

Provinsi Banten memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tingkat nasional akan tetapi PAD dan DAU nya sangat kecil jika di bandingkan dengan provinsi tetangganya yakni provinsi DKI Jakarta yang sebaliknya memiliki PAD yang tinggi yaitu 37 triliun rupiah dan dana alokasi umum (DAU) yaitu 37 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya berbeda sedikit lebih tinggi yakni sebesar 6.22 persen.

Tinjauan Pustaka

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai denga potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Tahar & Zakhiya, 2011).

Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No. 2 |9-16 p-ISSN 2541-7150 | e-ISSN 2776-7019

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataaan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar Pemda di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari penerimaan dalam negertinya dalam bentuk DAU (Kuncoro, 2014).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor prodksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa ada perubahan "teknologi" produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan para wiraswasta (Subandi, 2016).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selaama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai produk domestic bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (Rahardja & Manurung, 2008).

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan islam merupakan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan ras, agama dan kebangsaan. Apalagi ekonomi Islam memiliki orientasi yaitu bukan hanya kebahagiaan materi tetapi juga kepuasan ukhrawi. Selain itu berdasarkan perspektif islam pertumbuhan ekonomi juga perlu memperhatikan aspek aksiologis (nilai, moral). Sehingga terdapat orienstasi pada aspek ruhaniyah bukan hanya kepada kesejahteraan materi saja (Abidin, 2006).

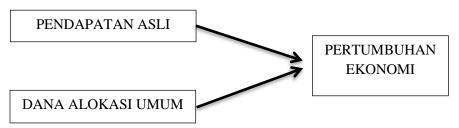
Pemerataan merupakan tujuan dari pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Menurut M. Umer Chapra dalam Muttaqin (2018) pemerataan ekonomi teridir dari lima unsur yaitu: *Pertama*, mewujudkan *full employment* dengan membuka lapangan pekerjaan sebanya-banyaknya. *Kedua*, karyawan diberikan upah yang pantas sesuai dengan kinerjanya. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi dan tunjangan hari tua untuk berjaga-jaga menghadapi hal yang tidak terduga seperti kecelakaan kerja. *Keempat*, memberikan bantuan dan dukungan bagi masyarakat yang keterbatasan fisik agar bisa hidup layak. *Kelima*, menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan ketentuan UU.

Dalam teori makro ekonomi yang dimaksud dengan pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu negara pada suatu negara pada suatu tahun tertentu, dan secara konseptual nilai tersebut dinamaka produk domestic bruto (PDB). Nilai tersebut dapat dihitung menurut harga berlaku (yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dimana PDB dihitung dan menurut harga tetap, yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dasar).

Sumber-sumber pendapatan daerah yang berupa PAD dan DAU di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut. Adapun kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut.

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran



Metode

Teknik Analisis Data Penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, yang datanya berbentuk bilangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai (Sugiyono, 2017). D

Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang diunduh melalui *website* banten.bps.go.id. Kemudian penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time-series) dari tahun 2013-2016 yang dioleh menggunakan analisis regresi berganda menggunakan SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan Output SPSS pada table One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai sig(2-tailed)-nya sebesar 0.200 artinya dengan Hipotesis H_0 berdistribusi normal dan taraf signifikansi 5% dengan daerah penolakan H_0 ditolak jika nilai Sig. > 5% maka di simpulkan residual berdistribusi normal dan dinyatakan model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikorelasi

Diketahui nilai VIF (*variance inflation factors*) pada setiap variabel nilainya tidak diantara 1-10. Jika nilai VIF tidak berada diantara nilai 1-10, maka data pada model dinyatakan terhindar atau bebas dari gejala multikolinieritas. Selain itu, diketahui nilai *tolerance* setiap variabel besarnya < 0.10, maka model dinyatakan terhindar dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskeditas

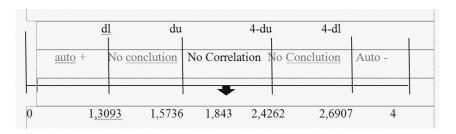
Berdasarkan uji heteroskedasititas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05, Sehingga dapat dinyatakan bahwa uji *spearman rho* yang di gunakan dalam penelitian ini bebas gejala heteroskedasititas.

Uji Autokorelasi

Melalui metode Cohrane-Orcutt didapatkan nilai DW sebesar 1,917 dengan kriteria uji, nilai DW yang terletak pada kriteria du < d < 4 - du, yaitu 1,5736 < 1,843 < 2,4262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Untuk melihat berada pada posisi mana dikatakan tidak ada autokorelasi digambarkan pada gambar sebagai berikut

Gambar 2. Daerah Uji Autokorelasi



Uji Hipotesis Uji Parsial (T)

Tabel 5.
Output SPSS Uji T
Coefficients^a

		Unstandardize	Standardized Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	388.034	36.254		10.70	.000
					3	
	Lag_X1	-7.061E-12	.000	035	205	.839
	Lag_X2	-2.167E-10	.000	461	-2.711	.011

a. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber: Olahan data SPSS

Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak, dan jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung variabel PAD (X1) lebih kecil dari t tabel (0.205 < 2,04523) maka Ho diterima. Dan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel PAD lebih besar dari 0,05 (0.839 > 0,05) maka Ho diterima.

Dan Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak, dan jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung variabel DAU (X2) lebih besar dari t tabel (2,711 > 2,04523) maka Ho ditolak. Dan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ho ditolak. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 (0.011 < 0,05) maka Ho ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Banten dan variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Banten.

Uji Simultan (F)

Tabel 6. Output SPSS Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47249.847	2	23624.923	3.947	.031 ^b
	Residual	167575.358	28	5984.834		
	Total	214825.205	30			

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

Sumber: Olahan data SPSS

Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka hasilnya Ho ditolak atau berarti variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Dan jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka hasilnya Ho diterima atau berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,947 > 3,33) maka Ho ditolak.

Jika tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima berarti memiliki pengaruh yang tidak signifikan, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,031 < 0,05) maka Ho ditolak. Dan dapat disimpulkan jika variabel PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Banten.

Uji Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Output SPSS Uji R dan R²

Model Summary^b

			_	
			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	.469ª	.220	.164	77.36171

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y
Sumber: Olahan data SPSS

Berdasarkan tabel hasil perhitungan, Nilai R sebesar 0,469 menunjukkan korelasi (hubungan) yang sedang antara variabel dependent Pertumbuhan Ekonomi (Y) dengan variabel PAD dan DAU (X). Korelasi yang terjadi adalah positif karena nilai R positif. Nilai R square dari variabel PAD (X1) dan DAU (X2) sebesar 0,220. Dengan demikian variabel PAD (X1) dan DAU (X2) berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 22%, Sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2013 - 2016. Kesimpulannya adalah Secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X1) mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2013-2016. Secara parsial variabel dana alokasi umum (X2) mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2013-2016. Hasil analisis data menunjukan bahwa besarnya pengaruh atau kotribusi yang diberikan simultan variabel PAD (X1) dan variabel DAU (X2) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 20%, Sedangkan sisanya sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Referensi

- Abidin, Z. (2006). Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Konvensional dalam Konsep Pertumbuhan Ekonomi. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), 173–185. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2561
- BPS Prov. Banten, B. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Banten Triwulan -III-2018*. BPS Prov. Banten.
- Eka Putri, Z. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Edisi Tiga. Erlangga.
- Mardiasmo, M. (2018). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2), 7.
- Nur'aini dkk, R. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Proceeding SENAT*, *Bandung*, Vol. 5.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Subandi, S. (2016). Ekonomi Pembangunan. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian. Alfabeta.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Vol. XII No. I.